



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AH FATHONIH
2. Jabatan : WAKIL REKTOR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3. NHK : 739857

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.960.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m<sup>2</sup>/42 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m<sup>2</sup>/42 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m<sup>2</sup>/50 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 2110 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 232.000.000

1. MOBIL, TOYOTA TOYOTA RUSH/TRD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, PIAGIO VESPA LX IGET 125.3V IE A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
3. MOTOR, HONDA X1N02Q43LO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 57.475.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 5.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 139.814.480**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.394.289.480



III. HUTANG

Rp. 1.031.097.507

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.363.191.973

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.